

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Mayoritas penduduk di Indonesia menganut agama Islam, dan oleh karena itu, ajaran Islam berperan penting dalam berbagai aspek kehidupan mereka, termasuk dalam menentukan cara memilih pemimpin. Sebagai panduan hidup yang komprehensif, ajaran Islam menyediakan prinsip-prinsip moral dan etika yang dapat diterapkan dalam proses pemilihan umum. Dalam konteks ini, pemilihan pemimpin tidak hanya dipandang sebagai keputusan politik, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral dan spiritual yang harus dilakukan dengan penuh pertimbangan [1]. Islam mengajarkan bahwa memilih pemimpin harus dilakukan dengan cermat, berdasarkan kualitas dan integritas calon pemimpin. Prinsip-prinsip seperti keadilan, kejujuran, dan kemampuan dalam memimpin adalah kriteria penting yang harus diperhatikan oleh pemilih. Dalam hal ini, ajaran Islam menekankan pentingnya memilih pemimpin yang mampu menerapkan prinsip-prinsip syariah dan memimpin dengan adil, serta melaksanakan tugasnya dengan baik demi kesejahteraan umat.

Selain itu, Islam juga mendorong adanya partisipasi aktif dalam proses pemilihan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan spiritual. Proses pemilihan yang transparan dan adil sejalan dengan ajaran Islam yang mengutamakan keadilan dan amanah. Oleh karena itu, umat Muslim di Indonesia diharapkan untuk terlibat secara aktif dalam pemilihan umum, tidak hanya dengan memberikan suara, tetapi juga dengan memastikan bahwa pilihan mereka didasarkan pada penilaian yang bijaksana dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Penerapan system Demokrasi di Indonesia, proses pemilihan dilakukan melalui sistem pemilihan umum dengan memberikan hak untuk memilih pemimpin mereka

secara langsung. Sistem ini memungkinkan partisipasi luas dari masyarakat dan memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk memilih pemimpin yang mereka anggap paling sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam.

Dengan demikian, umat Islam di Indonesia dapat memanfaatkan sistem demokrasi ini untuk memilih pemimpin yang tidak hanya memiliki kemampuan dan integritas, tetapi juga yang mampu mengedepankan keadilan dan kesejahteraan masyarakat serta berpegang teguh pada ketaqwaan kepada Allah. Islam memberikan fleksibilitas dalam hal metode pemilihan, yang penting adalah bahwa pemilihan tersebut dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar Islam, sehingga menghasilkan pemimpin yang benar-benar dapat membawa kebaikan bagi seluruh rakyat.

Pemilihan umum, atau sering disebut dengan Pemilu merupakan salah satu implementasi pelaksanaan kedaulatan rakyat [2]. Ufuria penyelenggaraan Pemilu di Indonesia, baik pemilihan umum legislatif, presiden dan wakil presiden maupun pemilihan kepala daerah dilakukan dalam rangka demi terpenuhinya kedaulatan rakyat sebagai system tatanegara untuk mengisi jabatan publik [3]. Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia juga merupakan amanah konstitusi yang terkandung di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam konteks demokrasi, Pemilu adalah mekanisme yang memungkinkan rakyat untuk menentukan secara mandiri atas kendali pemerintahan dan membuat kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pelaksanaan Pemilu di Indonesia tidak hanya sekedar formalitas, tetapi merupakan implementasi dari amanat yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-undang dasar ini menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut konstitusi. Dengan demikian, Pemilu menjadi sarana konstitusional untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki suara dalam pemerintahan dan kebijakan publik. Ini

adalah wujud nyata dari prinsip kedaulatan rakyat, di mana pemerintahan harus dibentuk berdasarkan kehendak dan aspirasi rakyat.

Dalam prakteknya, pelaksanaan Pemilu di Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan, seperti logistik, keamanan, dan kejujuran dalam proses pemungutan suara [4]. Namun, meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan tersebut, Pemilu tetap dianggap sebagai salah satu instrumen penting dalam menjaga dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Pemilu merupakan wadah utama di mana rakyat memiliki kesempatan untuk menyalurkan aspirasi dan hak politik mereka. Dalam konteks demokrasi, Pemilu tidak hanya menjadi sarana untuk memilih wakil rakyat atau pemimpin, tetapi juga merupakan cermin dari kedaulatan rakyat yang sesungguhnya.

Salah satu segmentasi kelompok pemilih yang sangat penting untuk dikaji dan diteliti lebih jauh adalah pemilih pemula. Disebut pemilih pemula adalah pemilih yang baru pertama kali untuk memberikan suaranya dalam Pemilu. Pendidikan pemilih bagi siswa sebagai bagian dari masyarakat pemilih pemula dalam Pemilu diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana pembelajaran untuk memahami kehidupan bernegara. Dalam jalur pendidikan formal, penanaman kesadaran politik biasanya dilakukan melalui berbagai kegiatan baik di dalam maupun di luar kurikulum. Di lingkungan sekolah, misalnya, pelajaran pendidikan kewarganegaraan dan kegiatan ekstrakurikuler seperti debat politik, simulasi pemilihan umum, dan organisasi siswa dapat memainkan peran penting dalam membangun pemahaman politik siswa. Program-program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang sistem politik, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pentingnya partisipasi aktif dalam proses demokrasi.

Sementara itu, dalam jalur non-formal dan informal, kesadaran politik dibentuk melalui interaksi sosial yang lebih langsung dan personal. Proses ini sering terjadi di lingkungan keluarga, di mana orang tua dan anggota keluarga lainnya dapat

mempengaruhi pandangan politik seseorang melalui diskusi dan contoh pribadi. Organisasi kemasyarakatan seperti kelompok warga atau komunitas lokal juga berperan dalam menyebarkan informasi politik dan mendorong partisipasi melalui kegiatan seperti pertemuan komunitas, seminar, dan aksi sosial. Forum-forum kemasyarakatan lainnya, seperti kelompok diskusi atau media sosial, menyediakan platform bagi individu untuk terlibat dalam percakapan politik, bertukar pendapat, dan mengembangkan pemahaman mereka tentang isu-isu publik.

Dengan demikian, baik jalur pendidikan formal maupun non-formal memiliki kontribusi penting dalam membentuk kesadaran politik. Pendidikan formal menyediakan landasan pengetahuan yang sistematis, sementara interaksi sosial dalam jalur non-formal dan informal menawarkan konteks praktis dan pengalaman langsung yang memperdalam pemahaman politik individu. Kombinasi dari kedua jalur ini dapat membangun warga negara yang lebih terinformasi, terlibat, dan bertanggung jawab dalam proses demokrasi..

Dominasi pemilih pemula di Indonesia cukup signifikan seiring dengan jumlah pemilih pemula yang meningkat. Namun, fakta rendahnya tingkat partisipasi pemilih pemula semakin mengecewakan [4]. Pemilih pemula, yang terdiri dari generasi muda berusia 17 hingga 21 tahun, merupakan kelompok yang sangat penting dalam setiap Pemilu. Mereka tidak hanya membawa semangat baru dan energi ke dalam proses demokrasi, tetapi juga memiliki perspektif yang segar terhadap isu-isu sosial, ekonomi, dan politik. Dengan jumlah yang cukup besar, pemilih pemula memiliki potensi untuk mempengaruhi hasil Pemilu secara signifikan, memberikan peluang bagi perubahan yang lebih baik sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan generasi muda.

Namun, di sisi lain, terdapat potensi tingkat partisipasi yang rendah di kalangan pemilih pemula yang mengkhawatirkan terutama di Kabupaten Pacitan. Beberapa faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya partisipasi ini antara lain kurangnya pendidikan

politik, minimnya pengetahuan tentang proses Pemilu, dan ketidakpercayaan terhadap sistem politik. Banyak pemilih pemula merasa bahwa suara mereka tidak akan membawa perubahan yang signifikan atau bahwa semua calon pemimpin sama saja. Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Bawaslu Agus Haryanto dalam wawancara 06 Juni 2024 sebagai berikut:

“Jumlah pemilih pemula di kabupaten pacitan kurang maksimal, seharusnya bias mencapai 2000 jiwa pemilih, namun dari informasi yang didapat hanya sekitar 700 jiwa pemilih baru di kabupaten Pacitan”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pacitan kurang maksimal dalam memaksimalkan pemilih pemula. Hal ini diperparah oleh kurangnya sosialisasi dan informasi yang efektif dari pihak penyelenggara Pemilu dan pemerintah tentang pentingnya partisipasi aktif dalam Pemilu.

Untuk meningkatkan partisipasi pemilih pemula, diperlukan upaya yang lebih besar dalam pendidikan dan sosialisasi politik. Sekolah dan lembaga pendidikan lainnya harus memainkan peran aktif dalam mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan pentingnya partisipasi dalam Pemilu. Program-program pendidikan yang menarik dan relevan bisa membantu membangun kesadaran politik sejak dini. Selain itu, penyelenggara Pemilu dan pemerintah perlu meningkatkan kampanye sosialisasi yang menasar pemilih pemula secara langsung, menggunakan bahasa dan platform yang mereka gunakan sehari-hari.

Meningkatkan partisipasi pemilih pemula memang membutuhkan upaya yang lebih besar dan terarah, terutama melalui pendidikan dan sosialisasi politik yang efektif. Sekolah dan lembaga pendidikan lainnya memiliki peran yang sangat penting dalam hal ini. Mereka harus aktif mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi dan pentingnya partisipasi dalam Pemilu ke dalam kurikulum dan kegiatan ekstrakurikuler. Melalui pendidikan yang sistematis dan menyeluruh, pemilih pemula dapat diberi pemahaman yang kuat tentang hak dan tanggung jawab mereka dalam proses politik.

Pada kasus yang ada di Indonesia, Sodikin [5] Peningkatan jumlah non-voter atau golongan putih, yang umumnya didominasi oleh kaum muda, menjadi perhatian signifikan dalam setiap pemilihan umum di Indonesia. Data menunjukkan bahwa persentase golongan putih mengalami kenaikan yang konsisten dari satu pemilu ke pemilu berikutnya. Pada Pemilu 1999, persentase golongan putih tercatat sebesar 10,21%. Angka ini meningkat menjadi 23,34% pada Pemilu 2004, dan melonjak lagi menjadi 39,10% pada Pemilu 2009. Kenaikan ini mencerminkan tren yang memprihatinkan, di mana semakin banyak pemilih, terutama dari kalangan muda, yang memilih untuk tidak menggunakan hak suara mereka.

Salah satu faktor yang turut berkontribusi pada fenomena ini adalah keterbatasan dalam pelaksanaan tugas sosialisasi kepada pemilih pemula yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Sosialisasi yang efektif bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan pemilih pemula dalam proses pemilihan. Namun, pelaksanaan sosialisasi ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran yang tersedia. KPU dan Bawaslu sering kali menghadapi tantangan dalam menjangkau seluruh pemilih pemula secara masif dan menyeluruh karena keterbatasan dalam jumlah staf serta anggaran yang tidak mencukupi.

Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya upaya yang lebih intensif dan terencana dalam sosialisasi pemilih, dengan meningkatkan alokasi anggaran dan memperkuat kapasitas SDM. Pendekatan yang lebih inovatif dan terintegrasi, seperti pemanfaatan teknologi informasi dan media sosial, dapat membantu menjangkau pemilih muda secara lebih efektif. Selain itu, kerjasama dengan berbagai lembaga pendidikan, komunitas lokal, dan organisasi pemuda juga dapat memperluas jangkauan sosialisasi dan mengurangi angka golongan putih di pemilihan mendatang. Dengan demikian,

diharapkan tingkat partisipasi pemilih dapat meningkat, dan proses demokrasi dapat berjalan dengan lebih inklusif dan representatif. Hal tersebut mendasari untuk menciptakan suatu inovasi terbaru guna mensosialisasikan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula menggunakan media pembelajaran berupa video kreatif agar siswa semakin lebih menyadari betapa pentingnya terlibat aktif dalam proses demokrasi di Indonesia khususnya dalam memilih pemimpin yang sesuai dengan perspektif Islam.

Melalui inovasi ini, diharapkan pemilih pemula dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang betapa pentingnya peran aktif dalam proses demokrasi, baik dari perspektif Islam maupun sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Mereka juga dapat menjadi agen perubahan di lingkungan sekitar mereka dengan menyebarkan pemahaman ini kepada teman-teman mereka. Dengan demikian, inovasi ini tidak hanya akan berdampak pada mahasiswa secara individual, tetapi juga pada masyarakat luas dengan membentuk pemilih yang lebih sadar, kritis, dan bertanggung jawab.

Kurangnya integrasi antara Pemilu dan prinsip-prinsip Islam juga disebabkan oleh kurangnya metode dan pemanfaatan media dalam mensosialisasikan pendidikan pemilih pemula. Media memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan informasi dan nilai-nilai terkait Pemilu, namun masih terdapat kekurangan dalam pemanfaatannya untuk tujuan pendidikan politik, terutama dalam konteks nilai-nilai Islam.

Diperlukan upaya lebih lanjut untuk mengatasi hambatan-hambatan ini. Salah satunya adalah meningkatkan kerjasama antara lembaga pendidikan Islam formal dengan pihak-pihak terkait, seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan organisasi-organisasi masyarakat sipil yang peduli terhadap pendidikan politik. Kerjasama ini dapat membantu mengembangkan kurikulum dan program-program pendidikan pemilih pemula yang lebih terintegrasi dengan nilai-nilai Islam.

Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, perlu ada sinergi antara berbagai pihak, termasuk lembaga pendidikan Islam, organisasi masyarakat sipil, pemerintah, dan media. Lembaga pendidikan Islam perlu memperbarui kurikulum mereka dengan memasukkan pendidikan politik yang berbasis nilai-nilai Islam. Di sisi lain, pemerintah dan penyelenggara Pemilu perlu bekerja sama dengan media untuk mengembangkan kampanye sosialisasi yang efektif dan tepat sasaran. Organisasi masyarakat sipil juga dapat berperan dalam mengadakan kegiatan-kegiatan edukatif yang menarik bagi pemilih pemula.

Dengan pendekatan yang terintegrasi dan kolaboratif, diharapkan Pemilu di Indonesia dapat semakin mencerminkan prinsip-prinsip kaidah hukum Islam, dan partisipasi pemilih pemula pun dapat meningkat secara signifikan. Hal ini akan membawa dampak positif tidak hanya pada kualitas demokrasi di Indonesia, tetapi juga pada pembentukan generasi pemimpin yang memiliki integritas dan komitmen terhadap nilai-nilai Islam dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dan mengambil judul thesis berjudul :“ *Voters Education Bagi Pemilih Pemula Perspektif Pendidikan Islam*”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka dibuat identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Sistem Pemilu di Indonesia perspektif Islam masih belum terintegrasi secara sempurna dalam konsep Pendidikan Islam.
2. Pendidikan pemilih pemula masih belum menjadi perhatian serius dalam lembaga pendidikan Islam formal.
3. Kurangnya memaksimalkan metode untuk menyampaikan konsep Pemilu bagi pemilih pemula di Kabupaten Pacitan

4. Kurangnya pemanfaatan media kreatif dalam mensosialisasikan pendidikan pemilih pemula.

### **C. Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini Penulis menentukan sebuah batasan penelitian pada pokok pembahasan tertentu yaitu:

1. Memfokuskan pada Sistem pemilu di Indonesia
2. Memfokuskan pada peran pendidikan Agama Islam dalam memberikan dorongan kepada pemilih pemula agar berpartisipasi dalam pemilu

### **D. Rumusan Masalah**

Dari hasil uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem Pemilu di Indonesia dalam Perspektif Islam?
2. Bagaimanakah Pendidikan Pemilih (*voters education*) dalam Islam bagi pemilih Pemula di Kabupaten Pacitan?
3. Bagaimana meningkatkan partisipasi Pemilih Pemula melalui Edukasi Islam?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis sistem Pemilu di Indonesia dalam perspektif Islam.
2. Menganalisis dan memahami sistem pendidikan pemilih (*voters education*) bagi pemilih pemula di Kabupaten Pacitan dalam perspektif pendidikan Islam.
3. Menganalisis partisipasi pemilih pemula di Indonesia melalui edukasi Islam.

## **F. Manfaat**

Sebagaimana tujuan penulisan tesis yang telah diuraikan oleh penulis di atas, penulis memiliki proyeksi mengenai manfaat yang diharapkan dari penulisan tesis ini.

Manfaat dan faedah dari penulisan tesis ini yang penulis dapatkan adalah :

### 1. Manfaat Teoritis :

- a. Secara teoritis penulisan tesis ini berguna sebagai media atau sarana pembelajaran metode penelitian di bidang agama Islam sehingga dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Sebagai sarana penambah kajian ilmu pengetahuan di bidang agama Islam dan politik.
- c. Sebagai acuan atau landasan dan reformasi untuk penelitian berikutnya.

### 2. Manfaat Praktis :

- a. Bagi Peneliti : memahami konsep-konsep mengenai Pemilu dan pendidikan pemilih bagi pemilih pemula dalam perspektif pendidikan Islam.
- b. Bagi Sekolah : Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap institusi pendidikan, khususnya dalam konteks perbaikan pembelajaran berbasis pendidikan demokrasi dari perspektif pendidikan Islam. Dengan menganalisis dan memahami implementasi serta dampak pendidikan demokrasi dalam lingkungan sekolah, penelitian ini dapat membantu merumuskan strategi yang lebih efektif dalam mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi ke dalam kurikulum dan kegiatan belajar mengajar..
- c. Bagi Guru Diharapkan agar para guru dapat mengoptimalkan pembelajaran demokrasi, terutama yang berkaitan dengan pemilihan umum (Pemilu) bagi pemilih pemula, dengan pendekatan yang lebih praktis dan efektif.

- d. Bagi Siswa (Pemilih Pemula) : Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan memberikan wawasan dan pengetahuan yang mendalam mengenai penerapan pendidikan demokrasi dalam konteks pendidikan Islam, serta dapat membangkitkan semangat peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan demokrasi di Indonesia.
- e. Bagi Pemerintah : diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan kebijakan khususnya untuk pengembangan di bidang politik, agama dan pendidikan.
- f. Bagi Penyelenggara Pemilu : diharapkan dapat menaikkan tingkat partisipasi masyarakat dalam kehidupan demokrasi di Indonesia